

STRATEGI KUTUP PERTUMBUHAN EKONOMI

Darnilawati

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Strategi kutub pertumbuhan merupakan potensi perkembangan bagi unsur-unsur ekonomi yang ada dan dapat menarik unsur-unsur ekonomi yang tidak ada sehingga terjadi permulaan suatu proses perkembangan. Di era otonomi daerah diperlukan strategi dalam pertumbuhan ekonomi daerah dengan memprioritaskan kebutuhan lokal yang sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan teori strategi kutub pertumbuhan ekonomi dan strategi apa yang diperlukan dalam pengembangan wilayah. Dengan pemaparan secara deskriptif analisis dengan pendekatan metode riset yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan telah dilaporkan dalam buku, artikel dalam jurnal professional ataupun bersumber dari internet.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa strategi kutub pertumbuhan merupakan strategi yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang atau merata. Tujuan strategi ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh wilayah.

Kata kunci : Kutub pertumbuhan , Ekonomi regional dan Otonomi daerah

PENDAHULUAN

Teori kutub pertumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Perancis Perroux, 1950, dengan teorinya *pole de croissance*, yang menyatakan pertumbuhan tidak muncul disetiap tempat secara simultan dan serentak. Pertumbuhan itu muncul di kutub-kutub pertumbuhan diciptakan dan memiliki intensitas yang berbeda yang disebut pusat pertumbuhan. Kutub pertumbuhan regional terdiri dari satu kumpulan industri-industri yang mengalami kemajuan dan saling berhubungan, serta cenderung menimbulkan aglomerasi yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi eksternal.

Faktor-faktor eksternal itu seperti turunnya biaya produksi, pembangunan pasar bagi pekerja urban dan akses pasar yang lebih besar. Menurut Arsyad (1999), bahwa inti dari teori Perroux ini adalah :

1. Kutub pertumbuhan itu muncul dengan adanya industri unggulan sebagai penggerak utama pembangunan suatu daerah.
2. Pemusatan industri di suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya pola konsumsi yang berbeda antar daerah.
3. Daerah yang relatif maju atau aktif (daerah yang memiliki industri unggulan) akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif (daerah yang memiliki industri yang tergantung dari industri unggulan/pusat pertumbuhan).

Kutub pertumbuhan (growth pole) merupakan potensi perkembangan bagi unsur-unsur ekonomi yang ada dan dapat menarik unsur-unsur ekonomi yang tidak ada, sehingga dapat menimbulkan permulaan suatu proses perkembangan. Berdasarkan alasan tersebut kutub pertumbuhan sering dijadikan suatu kebijakan ekonomi dalam menciptakan strategi pembangunan untuk menciptakan strategi kutub pertumbuhan terutama pada negara-negara yang sedang berkembang, sehingga dapat direncanakan arah kebijakan pembangunan kepada daerah-daerah yang memiliki industri unggulan (pusat industri) dan menyiasati daerah-daerah yang relatif pasif sehingga berimbang dengan daerah yang relatif maju.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah no.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang no 32 tahun 2004, maka otonomi daerah mulai dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Maka daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk bagaimana daerah melakukan perencanaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sejalan dengan perkembangan waktu dengan telah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian maka akan muncul paradigma baru dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengatur daerahnya masing-masing. Sehingga diperlukan strategi dalam pertumbuhan ekonomi daerah dengan memprioritaskan kebutuhan lokal yang sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya dan berbeda dengan daerah lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan secara deskriptif analisis untuk menggambarkan berbagai hal terkait dengan judul. Metode pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui critical appraisal (telaah kritis), yaitu dengan mengkritisi berbagai tulisan dan dokumen yang relevan dengan persoalan dan meta analisis yaitu dengan memetakan berbagai persoalan terkait permasalahan strategi kutup pertumbuhan. Metode riset sekunder (secondary research) yaitu dengan menggunakan data riset yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan telah dilaporkan dalam buku, artikel dalam jurnal profesional atau sumber dari internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Strategi Kutup Pertumbuhan

Sehubungan dengan perumusan strategi pembangunan, maka perdebatan utama yang muncul, khususnya pada saat-saat awal perencanaan pembangunan berkisar pada persoalan apakah prioritas diberikan untuk pengembangan pertanian atau pengembangan industri. Dalam kaitan ini, Forbes (1986: 65) mengemukakan, ilmu ekonomi yang muncul dalam tahun 1950-an dan tahun 1960-an pada dasarnya memusatkan perhatian pada kebutuhan untuk memindahkan negara-negara dengan basis pertanian yang rendah produktivitasnya ke basis industri yang tinggi produktivitasnya.

Diantara contoh-contoh yang paling menonjol dari teori modernisasi difusionis ini adalah model “pusat pinggiran” (core-periphery) dari Pebrisch (1949) yang dikembangkan kemudian oleh Friedman (1969) menjadi “teori pembangunan regional”; konsep “kutup pertumbuhan” (growth poles), dari Perroux (1950) dan “pusat pertumbuhan” (growth centres) dari Boudeville; serta geografi dari madzhab modernisasi yang dipimpin oleh Soja (1968), Gould (1970), Ridel (1970) dan Berry (1972). Penekanan teori ini adalah pada “ difusi pertumbuhan spasial “ yang menghasilkan inovasi diseluruh ruang perekonomian dari pangkalan terdepan semula.

Salah satu aspek yang lebih menarik dari analisis dan praktek perencanaan ekonomi regional selama beberapa dekade telah mengubah sikap ke arah strategi kutub pertumbuhan. strategi kutup pertumbuhan biasanya memfokuskan/memusatkan investasi disejumlah lokasi (biasanya sebagai bagian dari upaya yang disengaja untuk memodifikasi struktur tata ruang wilayah), dalam upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi dan dengan demikian meningkatkan tingkat kesejahteraan suatu daerah.

Pada pertengahan 1960-an strategi kutub pertumbuhan telah muncul sebagai objek daya tarik yang cukup besar dan antusiasme, dan dipandang sebagai ide/gagasan yang baik, ungkapan dari LasueÂn (1969, p.137). Beberapa hal yang melatarbelakangi suatu negara menggunakan strategi kutub pertumbuhan ini adalah akibat adanya tekanan ekonomi atau depresi yang berdampak negatif yang ditandai dengan pengangguran yang relatif tinggi, rendah pendapatan per kapita, tingkat bawah rata-rata pembangunan modal manusia, tidak mencukupinya penyediaan layanan publik dan infrastruktur, dan lain-lain. Perekonomian daerah tersebut baik memiliki spesialisasi manufaktur sebelumnya dengan urbanisasi besar atau didasarkan pada eksploitasi sumber daya dan ada yang kurang dalam pengaturan perkotaan atau pedesaan.

Karakteristik dari strategi kutub pertumbuhan ada 4 macam, yaitu :

1. Strategi kutub pertumbuhan mendorong terciptanya pertumbuhan lapangan kerja dan populasi di wilayah tertentu yang telah direncanakan sebagai fokus utama untuk investasi daerah, sehingga menjadi pusat industri. Strategi kutub pertumbuhan memberikan batasan tertentu melalui pengaturan-pengaturan dan kebijakan dalam pembatasan jumlah lokasi-lokasi yang dirancang sebagai kutub pertumbuhan.
2. Strategi kutub pertumbuhan dalam menentukan ruang atau lokasi daerah yang menjadi kutub pertumbuhan tersebut diperlukan seleksi/ diskriminasi keruangan berdasarkan faktor-faktor seperti keuntungan locational antar daerah dan intraregional serta tingkat hirarki dalam sistem perkotaan.
3. Strategi kutub pertumbuhan tidak lepas dari perencanaan tata ruang kota yang ada sehingga pertumbuhan terkonsentrasi untuk berkembang, baik terhadap lapangan pekerjaan dan populasi dalam wilayah.

Variasi Keruangan Dan Ketimpangan Regiona

Banyak perencanaan yang pada mulanya tidak bersifat keruangan dan tidak memperhitungkan lokasi pengembangan yang menjadi sasaran proyek. Keadaan ini akan meningkatkan atau mengintensifkan pola inti-pinggiran (*coreperiphery*), dalam suatu negara, sehingga keuntungan pembangunan cenderung terpusat pada suatu "wilayah" dari pada menyebar. Adapun wilayah yang dimaksudkan disini adalah pedesaan dan perkotaan. Variasi keruangan didalam pembangunan, menyangkut dua konsep utama, yaitu konsep pusat pinggiran (*core-periphery*) dan konsep kutub pertumbuhan - pusat pertumbuhan (*Growth pole-Growth centres*), yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut : (Henderink & Murtomo,1988).

Konsep Pusat Pinggiran (*Core-Periphery*)

Konsep pusat pinggiran ini pertama-tama dikemukakan pada tahun 1949 oleh Pebrisch, seorang ahli ekonomi Amerika Latin. Tipe teori pembangunan ini mencoba memberikan gambaran dan menerangkan tentang perbedaan pembangunan (*development*), tetapi penekanannya dari aspek keruangan. Jadi konsep ini sesuai dengan kajian geografi yang juga melihat sesuatu dari segi keruangan. Perbedaan antara daerah pusat (C) dan daerah pinggiran (P) dapat dijumpai dalam beberapa skala: di dalam region, antar regions dan antara negara (pelabuhan dan daerah pendukungnya: Kota dan Desa; Negara Maju dan Negara Sedang Berkembang).

Dari konsep ini kemudian berkembang menjadi beberapa pandangan teoritis mengenai perbedaan pembangunan yaitu kemajuan antara pusat dan pinggiran (*Core-periphery*), seperti teori polarisasi ekonomi dari Myrdal dan Hirschman, teori pembangunan regional dari Friedman dan pandangan Marxist. Menurut Myrdal "*Core region*" adalah sebagai magnet yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya, karena adanya sebab-sebab kumulatif ke arah perkembangan ("*Cumulative upward causation*"): seperti arus buruh dari pinggiran ke pusat (P ke C); tenaga terampil, modal dan barang-barang perdagangan yang secara spontan berkembang di dalam ekonomi pasar bebas untuk menunjang pertumbuhan disuatu lokasi (wilayah) tertentu.

Konsep Kutub-Kutub Pertumbuhan Dan Pusat-Pusat Pertumbuhan (*Growth Poles Dan Growth Centres*).

Konsep kutub pertumbuhan diformulasikan oleh Perroux, seorang ahli ekonomi bangsa Perancis pada tahun 1950. Kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstral, sebagai tempat kekuatan – kekuatan sentrifugal (memencar) dan kekuatan sentripetal tertarik kearah situ. *Growth poles* bukan Kota atau Wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis (lima industri) dan hubungan kegiatan ekonomi yang dinamis demikian, tercipta di dalam dan diantara sektor-sektor ekonomi. Sedangkan konsep pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville, seorang ahli ekonomi Perancis. Ia menggunakan konsep kutub pertumbuhan yang sudah ada, dijadikan konsep keruangan yang kongkrit. Pusat pertumbuhan adalah sekumpulan (geografis) semua kegiatan. Pusat pertumbuhan adalah Kota-Kota atau wilayah perkotaan yang memiliki suatu industri "*propulsive*" yang kompleks. *Propulsive industries* adalah industri yang mempunyai pengaruh besar (baik langsung maupun tidak langsung) terhadap semua kegiatan lainnya.

Ketimpangan Regional

Pertumbuhan geografi modern dimulai dalam periode pasca perang dengan fokus pada diferensiasi wilayah (*areal defferentiation*). Richard Hartshone dalam bukunya "*The Nature of Geography*" (1949), mendefinisikan areal defferentiation sebagai perbedaan yang terdapat diberbagai wilayah di permukaan bumi. Hartshone merupakan penganjur terkemuka yang memusatkan perhatian kepada diferensiasi wilayah dan menunjuk diferensiasi wilayah sebagai obyek studi geografi yang fundamental (Daldjoeni, 1991). Sementara itu, Forbes (1986) mengemukakan bahwa, selama seperempat abad setelah tahun 1945, sejumlah besar tulisan geografi regional mengenai dunia bukan barat diterbitkan. Misalnya geografi regional mengenai India, Pakistan dan Asia Tenggara. Demikian pula didirikannya Universitas-Universitas baru di daerah bekas jajahan setelah perang, berkaitan dengan meluasnya risert mengenai geografi regional. Kedua gejala tersebut sekaligus merupakan reaksi terhadap kecenderungan munculnya masalah-masalah/ketimpangan regional diberbagai belahan dunia bukan barat.

Pada bagian lain dikemukakan bahwa masalah regional telah membuka arena bagi perdebatan besar dikalangan ahli geografi kontemporer, perencana regional, ilmu regional dan ilmu sosial pada umumnya. Terhadap masalah ini terdapat tiga pendekatan utama, yakni :

- a. *Pendekatan marjinalis*, yang menekankan pentingnya alokasi sumber-sumber daya melalui pasar dan memandang ketimpangan regional sebagai suatu gejala transisi.
- b. *Pendekatan institusionalis* yang berdasar pada prinsip "*penyebab sirkuler dan kumulatif*". Penekatan ini mengakui kecenderungan kearah ketimpangan spasial dalam jalannya pasar kapitalis. Dalam kaitan ini, Stilwell (1978) seperti dikutip Forbes (1986) menjelaskan bahwa sekali ketimpangan regional berkembang, jalannya pasar dan migrasi modal serta buruh khususnya cenderung tidak mengurangi ketimpangan. Sebaliknya dari ramalan umum ilmu ekonomi neoklasik, setiap kecenderungan kearah ketimpangan regional, diatasi oleh kecenderungan tandingan yang kuat kearah ketimpangan.
- c. *Pendekatan difusionis*, untuk menahan kecenderungan kearah ketimpangan regional, intervensi pemerintah dianggap perlu sebagai mana pandangan penulis-penulis utama mengenai isu ini, termasuk Hirshman (1958), Myrdal (1957), Peroux (1950) dan Friedman (1966). Pandangan ini dilukiskan dengan geografi modernisasi atau teori modernisasi difusionis dengan berbagai model/konsep seperti telah diuraikan dibagian pendahuluan.

Strategi Pengembangan Wilayah

Ada beberapa strategi pengembangan wilayah dengan konsep pusat-pusat pertumbuhan ini (Parr, 1999), yaitu :

- (a) Membangkitkan Kembali Daerah Terbelakang (Depressed Area),
Daerah terbelakang dipandang sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, kesejahteraan penduduk di bawah rata-rata, serta rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada. Strategi ini dilakukan untuk menciptakan struktur ruang wilayah yang lebih kompetitif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan antara pergerakan modal secara inter-regional. Tujuannya adalah mencegah modal ke luar wilayah, serta mencegah tingginya populasi di daerah tersebut. Hasil yang kemudian diharapkan adalah berupa transformasi struktur ruang ekonominya.
- (b) Mendorong Dekonsentrasi Wilayah,
Strategi ini dilakukan guna menekan tingkat konsentrasi wilayah, serta bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, khususnya pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan. Artinya, pengembangan yang dilakukan adalah pada wilayah non-metropolitan, untuk menekan perannya yang sudah terlalu besar. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah perlunya mempertimbangkan faktor lokasi pengembangan, bahwa tidak semua lokasi layak dijadikan sebagai pusat pertumbuhan.
- (c) Memodifikasi Sistem Kota-Kota,
Tujuan strategi ini adalah untuk mengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya pengaturan sistem perkotaan yang memiliki hierarki yang terstruktur dengan baik dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.
- (d) Pencapaian Terhadap Keseimbangan Wilayah,
Strategi ini muncul akibat kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Kemudian ada 3 (tiga) dasar rasional yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan secara keseluruhan :

1. Konsentrasi Prasarana Kota Pada Pusat Pertumbuhan,
Pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan didefinisikan dalam konteks yang luas yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama ekonomi dan tujuan sosial.

Untuk prasarana transportasi termasuk di dalamnya pembangunan baru dan peningkatan jalan dengan fokus pada pusat pertumbuhan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya. Prasarana yang berskala luas ini akan menimbulkan eksternalitas, sehingga akan membuat daerah menjadi lebih atraktif bagi perusahaan dalam konteks lokasi dan menstimulasi masuknya investasi ke dalam pusat pertumbuhan. Untuk melengkapi prasarana tersebut harus didukung oleh kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya.

2. Konsentrasi Aktivitas Perekonomian (Aglomerasi)

Konsentrasi/ aglomerasi aktivitas perekonomian di pusat pertumbuhan terutama industri yang memiliki keterkaitan ke depan (*forwad linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*). Hal ini akan dipengaruhi oleh aliran investasi yang masuk langsung ke dalam pusat pertumbuhan dan dikaitkan dengan eksploitasi aglomerasi ekonomi. Konsentrasi aktivitas ekonomi ini sangat bergantung pada kelengkapan prasarana kota.

3. Kutub yang direncanakan berdasarkan keunggulan komperatifnya,

Hal ini terutama didasarkan pada kebijakan spasial untuk mengembangkan pusat pertumbuhan dengan melihat aspek keunggulan komperatif daerah, kependudukan dan kinerja ekonomi daerah. Bagaimanapun juga rasionalitas dari strategi pusat pertumbuhan memunculkan dua pola yang berbeda, pertama adalah struktur ruang wilayah mengalami perubahan yang radikal dengan pertumbuhan pada kutub yang direncanakan yang disertai oleh redistribusi utama dari populasi dan pekerja dengan gaji murah (*low-cost labor*) ke dalam pusat dan dengan menimbulkan efek ke sektor lainnya, yaitu perdagangan dan jasa. Semua itu akan mendorong masuknya investasi ke dalam pusat pertumbuhan dan meningkatkan kinerja ekonomi wilayahnya.

Implikasi bagi Indonesia dan Daerah

Pembangunan nasional yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, namun demikian pembangunan tersebut ternyata juga menimbulkan dampak kesenjangan yang lebar antar daerah seperti antara Jawa-luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta antara Kota – Desa. Untuk dua konteks pertama, ketimpangan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan, yang pada titik paling ekstrim muncul dalam bentuk upaya-upaya separatis.

Untuk yang ketiga, kesenjangan antara desa dan kota adalah konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, hal ini juga disebabkan oleh kesalahan sistem dalam perencanaan yang belum berpihak kepada kepentingan publik di daerah, sehingga akibatnya Kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, sedangkan wilayah pedesaan relatif tertinggal.

Sehubungan dengan perencanaan pembangunan wilayah, Dusseldorp menawarkan dua cara dari atas kebawah (*top down approach*) yaitu perencanaan nasional memberikan petunjuk berapa besar keuangan yang disediakan untuk daerah; kemudian dilakukan dari bawah keatas (*bottom up approach*) yang dimulai dari perencanaan wilayah taraf terendah dan berakhir dengan perencanaan nasional. Untuk perencanaan wilayah secara keseluruhan (*regional planning*) tersebut dapat digunakan beberapa metode seperti :

1. *Pengembangan wilayah secara admistratif* atau secara geografis dengan mengembangkan seluruh wilayah pedesaan dan perkotaan, misalnya pengembangan daerah Jawa Barat atau pengembangan wilayah geografis Jawa Barat (terdiri atas Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta).
2. *Pengembangan wilayah aliran sungai* yang pengembangannya dilakukan di wilayah aliran sungai tertentu, seperti yang telah dilakukan oleh Tennessee Valey Authority di wilayah Sungai Tennessee di Amerika Serikat, dimana telah dibangun beberapa bendungan. Diwilayah aliran sungain tersebut dilakukan peningkatan pemanfaatan sungai, tanah dan sumberdaya alam lainnya. Dengan demikian dapat dikembangkan pertanian dan peternakan, kehutanan, industri, perikanan, pelayanan dan sebagainya. Dalam pengembangan tersebut digunakan pendekatan teritorial.
3. *Pengembangan wilayah pedesaan* yang dilakukan dengan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk dengan mengembangkan pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok penduduk. Hal itupun menggunakan pendekatan teritorial. Pembangunan desa yang baru (diluar Jawa) dilakukan dengan transmigrasi, permukiman kembali dan perkebunan inti rakyat (PIR); sedangkan pembangunan desa lama (diseluruh Indosnesia) dilakukan dengan sistem unit daerah kerja pembangunan (UDKP), pendekatan ekologi, desa terpadu dan sebagainya.

4. *Pengembangan wilayah menurut sistem perkotaan* yang termasuk perencanaan wilayah fungsional serta mempunyai hubungan dalam ruang (spasial) atau hubungan difusi yang meliputi dua konsep berikut : Konsep “kutub pertumbuhan” (*growth pole*), yang terpusat dan mengambil temat (Kota) tertentu sebagai pusat pengembangan yang diharapkan menjalankan perkembangan ke pusat-pusat yang tingkatannya lebih rendah. Dalam konsep ini terdapat istilah *spread* dan *trickling down* (penjalaran dan penetesan) serta *backwash* dan *polarization* (penarikan dan pemusatan).

Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia

Kebanyakan Negara-Negara Sedang Berkembang (termasuk Indonesia) strategi pembangunan mengandalkan pada pendekatan *Growth-Centres* (pusat-pusat pertumbuhan) dan meletakkan industri sebagai “*leading sector*” (sektor unggul). Dengan memusatkan industri di pusat pertumbuhan, maka diharapkan strategi itu mampu memecahkan masalah keterbelakangan dan kemiskinan dan pedesaan. Secara teoritis diyakini bahwa daerah pinggiran (*periphery*) akan berkembang melalui efek menyebar (*spread effect*) atau efek tetesan ke bawah (*trickle down-effect*) dari pusat-pusat pertumbuhan. Prakteknya pembangunan wilayah yang menggunakan strategi kutub pertumbuhan lebih menguntungkan pusat perkotaan. Hampir semua infrastruktur dibangun di daerah urban sehingga otomatis pemusatan industri juga di daerah perkotaan. Dampak penyebaran tidak merata berakibat pada pembangunan yang tidak seimbang (*unbalanced development*). Tentu ini menjadi masalah karena pasti akan terjadi kesenjangan antar wilayah.

Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia meliputi :

1. Mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau. Selain mengembangkan klaster industri berbasis sumber-sumber superior, baik komoditas maupun sektor. Koridor pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap :
 - a. Mengidentifikasi pusat-pusat ekonomian, misalnya Ibu Kota Propinsi.
 - b. Menentukan kebutuhan penghubung antara pusat ekonomi tersebut, seperti trafik barang.
 - c. Validasi untuk memastikan sejalan dengan pembangunan nasional, yakni pengaturan area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur serta fasilitas.
 - d. Menentukan hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. Misalnya menghubungkan area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.

2. Memperkuat hubungan Nasional baik secara lokal maupun Internasional, hal ini dapat menciptakan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan dan menyadari perlunya akses-akses kesejumlah layanan. Seperti intra dan inter-konektivitas antara pusat pertumbuhan serta pintu perdagangan dan pariwisata Internasional. Mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau iptek. Beberapa elemen utama di sektor iptek adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk kejuaraan serta pelatihannya. Meningkatkan level kompetensi teknologi dan sumber daya ahli. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan baik pemerintah maupun swasta dengan memberikan insentif serta menaikkan anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi kutup pertumbuhan merupakan strategi yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang/merata. Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan strategi ini paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktek. Tujuan dari strategi ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh wilayah.
2. Beberapa karakteristik dari strategi kutup pertumbuhan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan populasi dalam suatu wilayah pada sebagian lokasi atau pusat yang telah direncanakan pada satu periode tertentu,
 - b. Dibutuhkan pembatasan jumlah lokasi-lokasi atau pusat-pusat yang dirancang sebagai pusat,
 - c. Diperlukan seleksi/diskriminasi keruangan di antara lokasi-lokasi yang ada,
 - d. Modifikasi struktur keruangan terhadap lapangan pekerjaan dan populasi dalam wilayah.
3. Beberapa strategi pengembangan wilayah dengan konsep kutup pertumbuhan yaitu :
 - (a) Membangkitkan kembali daerah terbelakang (depressed area),
 - (b) Mendorong dekonsentrasi wilayah,
 - (c) Memodifikasi sistem Kota-Kota,
 - (d) Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah.

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antaranya :

1. Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayahnya sebaiknya dengan menggunakan teori kutub pertumbuhan ini supaya dapat mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran dapat diturunkan, dan keseimbangan wilayah dapat tercapai.
2. Penelitian ini masih sangat terbatas pada teori saja, untuk itu disarankan kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang teori kutub pertumbuhan wilayah atau daerah dengan pendekatan dan variable yang berbeda dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ALLEN, K. dan MacLennan, M. C. (1970). *Regional Masalah dan Kebijakan di Italia dan Perancis*. London: Allen dan Unwin.
- ALONSO, W. (1968) *Perkotaan dan regional ketidakseimbangan di bidang ekonomi, pembangunan Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Budaya*, 17, hlm 1 ± 14.
- Appalachian DAERAH KOMISI (1970) *Para urban-rural strategi pertumbuhan di Appalach besar besaran*. Komisi Staf Ringkasan Laporan, Washington, DC.
- AYDALOT, P. (1965) *Catatan sur les eÂconomies externes et quelque s gagasan connexes*, *Revue Economique*, 16, hlm 944 ± 973.
- BERRY, B. J. L. (1971), *Ukuran Kota dan Ekonomi Pengembangan: conceptual sintesis dan kebijakan masalah dengan referensi khusus untuk Selatan dan Asia Tenggara*, di: L. Jakobson dan V.
- BERRY, B. J. L. (1973) *Pertumbuhan penting tiang: hierarchical diffusion dan penyebaran efek*, di: K. S. O. BEAVON dan T. J. D. FAIR (Eds) *Perkotaan dan Pembangunan Daerah*, hlm 127 ± 144. Johannes burg: Afrika Selatan ical geograph Masyarakat.
- Bintarto R. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Boudeville, J. R. (1966) *Masalah Daerah Perencanaan Ekonomi*. Edinburg h: Edinburg h University Press.
- Budiman Arief. 1995. *Teori Pembanguan Dunia III*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Breathnach, P. (1982) *Runtuhnya growthcentre kebijakan: kasus Republik Irlandia*, in: R. HUDSON dan J. LEWIS (Eds) *Regional Perencanaan di Eropa*, hlm 35 ± 56. London: Pion.

- Bylund, E. (1972) *Pertumbuhan pusat dan administrasi Permasalahan dalam kerangka Lokasi Swedia kebijakan*, dalam: A. KUKLINSKI (Ed.) *Pertumbuhan Polandia dan Pusat Pertumbuhan Daerah Perencanaan*, hlm 231 ± 242. Paris dan Den Haag: Mouton.
- CAMERON, G. C. (1970) *Daerah Pertumbuhan, Pertumbuhan Pusat dan Regional conversion*, Skotlandia, *Journal Politik Ekonomi*, 17, hlm 19 ± 38.
- Daldjoeni N. 1991. *Pengantar Geografi*. Bandung: Alumni.
- Dickenson, J. P. 1992. *Geografi Negara Berkembang*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Forbes, Dean K. 1989. *Geografi Keterbelakangan, Sebuah Survey Kritis*. Jakarta: LP3ES.
- Henderink, J & Murtomo R. 1988. *Konsep dan Teori Pembangunan, Nr XII*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Jaya Appalray & Safier M. 1976. *Growth Centre Strategies in Less-Developed Countries: in A.Gilbert (ed): Development Planning Spatiel Structure*. London.
- Jayadinata, J. T. 1992. *Tataguna Lahan Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Mabogunye, A. C. 1978. *Growth Poles and Growth Centre in Regional Development of Nigeria, in A. Kuklinshi; Regional Policies in Nigeria, India, and Brazil*. The Hague. P.5-11.
- Nawanir, Hanif (2003), *Studi Pengembangan Ekonomi dan Keruangan Kota Sawahlunto Pascatambang*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (2003)
- Parr, John B, *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning : Retrospective View*, Carfax Publishing 1999.
- PRAKASH (Eds) , *Urbanization dan Nasional Pembangunan, hlm 111 ± 155*. Beverly Hills, CA: Bijak Publicatio ns.
- Suhardjo, A. J.. 1995. *Konsep-Konsep Dasar Dalam Geografi*. Yogyakarta: Fakultas Geografi PPS UGM.
- Weeler, J. O. & Muller, Peter, O. 1986. *Principles of Spatial Interaction*. Terjemahan J. Esomar (1992). Manado: FPIPS IKIP